

TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG

PRESISI DIPA

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARAN - BERKEADILAN



PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PUSKEU POLRI TH 2025

BJP LUKAS AKBAR ABRIARI SIK MH
KAPUSKEU POLRI



Info Dipa

Rincian Output

Realisasi Belanja

Analisa Capaian Output

POSISI PUSKEU POLRI

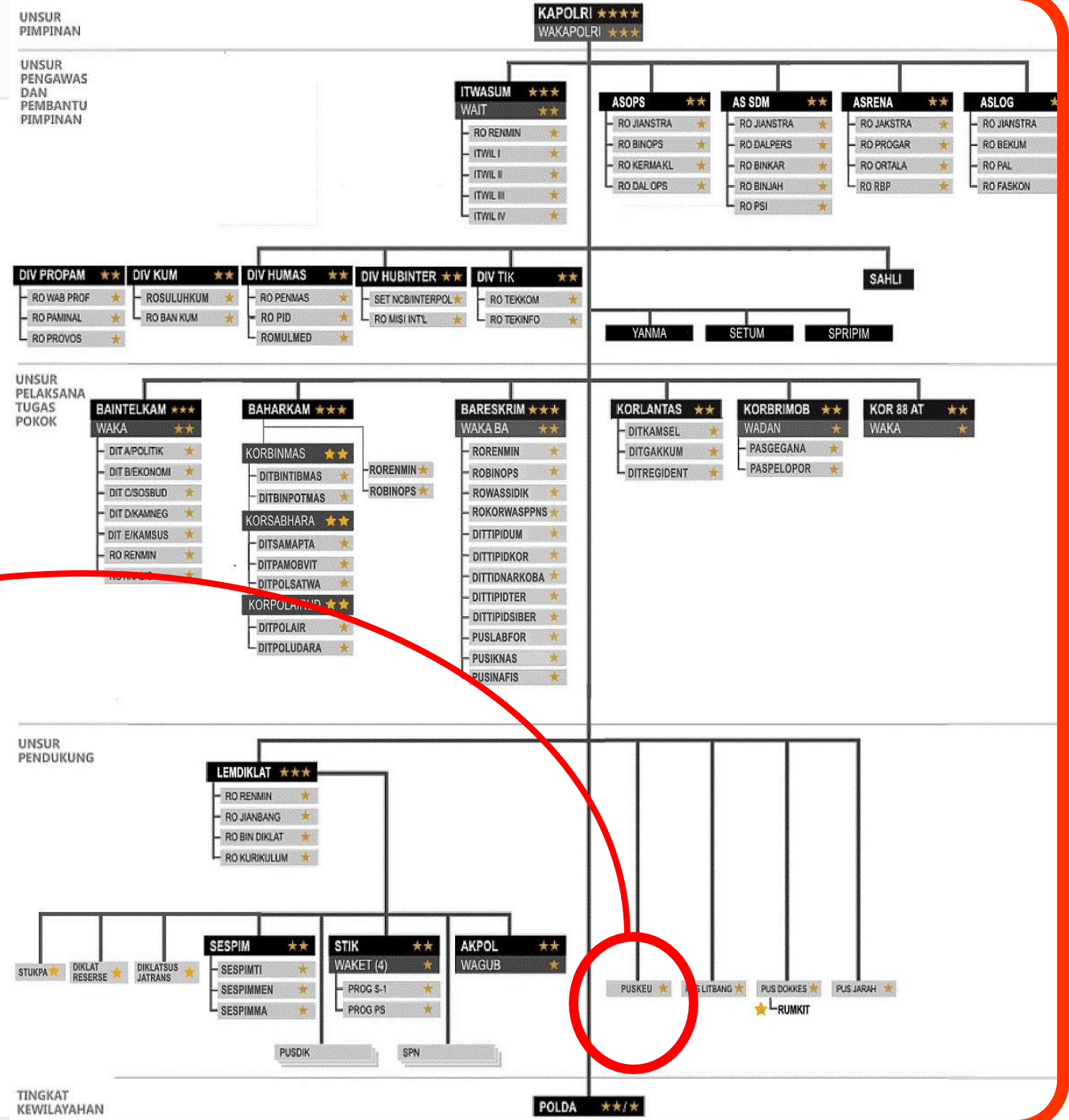
Lainnya



PUSKEU POLRI

"TEPAT"

(Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel, Transparan)



STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI

47.71%
Rp. 58.7 T dari pagu : 123 T

KAPUSKEU POLRI

UNSUR PIMPINAN

URKEU

SET

URTU

SUBBAG REN

SUBBAG SUMDA

SUBBAG BINFUNG

UNSUR PEMB PIMP DAN PELAKS STAF

BID BIA

BID APK

BID DAL

BID VERIF

URMIN

URMIN

URMIN

URMIN

SUBBID APBN

SUBBID NONAPBN

SUBBID MINLAP

SUBBID SISA AKUN

SUBBID TABU MANUAL

SUBBID LAPKEU

SUBBID SISMET

SUBBID WASGAR

SUBBID INFO

SUBBID VERIF WIL I

SUBBID VERIF WIL II

SUBBID VERIF WIL III

UNSUR PELAKSANA TEKNIS

Rank

Satker

Dipa (Rp)

Realisasi (Rp)

Perser

Rank

Satker

BID KEU MABES

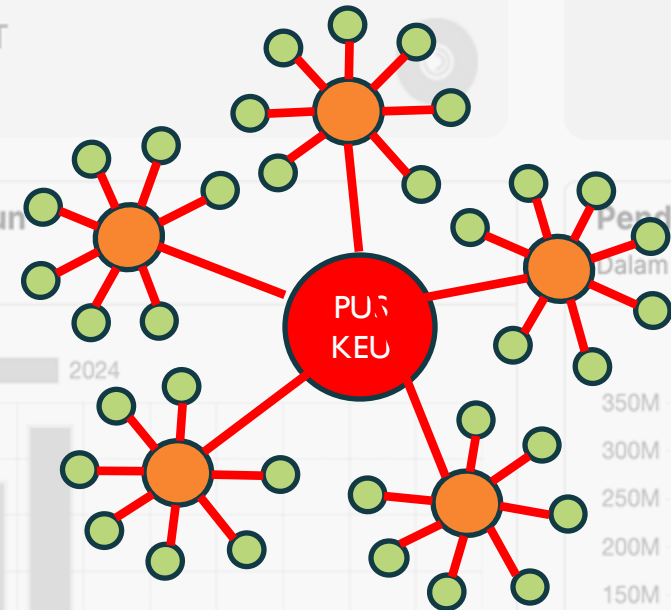
UNSUR PELAKSANA UTAMA

VISI & MISI PUSKEU POLRI

VISI : MENJADI PEMBINA FUNGSI KEUANGAN YANG MODERN DAN UNGGUL

MISI :

- 1. MEMPERKUAT PEMBINAAN FUNGSI KEUANGAN POLRI DI PUSAT SAMPAI KE WILAYAH;**
- 2. MENJAMIN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN POLRI YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;**
- 3. MEMPERKUAT SISTEM MANAJEMAN PUSAT KEUANGAN YANG TERINTEGRASI DAN TERPERCAYA.**



34 Bidkeu Polda
2 Bidkeu Mabes

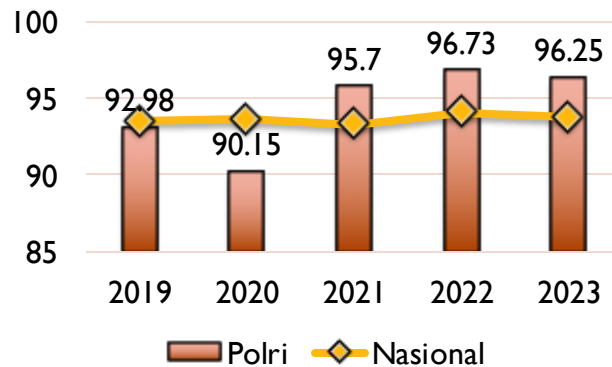
1442 satker

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA POLRI PUSKEU POLRI

**-OPINI WTP DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN POLRI
OLEH BPK TELAH DICAPAI 12X BERTURUT TURUT SEJAK TAHUN
2013 S/D 2024**

-NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai IKPA



No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ³⁾	WTP	WDP	³⁾	³⁾	³⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
55.	081	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾

PIAGAM PENGHARGAAN WBK PUSKEU POLRI



PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM TH 2022



LAYANAN PUSKEU POLRI

- EKSTERNAL

- PEMBIAYAAN PHLN/PDN/ RMP
- PELAYANAN SKB DAN PEMBUKAAN L/C

- INTERNAL POLRI

- PENYALURAN TUNKIN
- PENYALURAN ANGGARAN KONTIJENSI/DUK OPS POLRI
- PENYALURAN ANGGARAN DANA SAMSAT/JASA RAHARJA
- VERIFIKASI PERTANGGUJAWABAN ANGGARAN <500JT
- SERTIFIKASI PEJABAT PERBENDAHARAAN

MOTTO PUSKEU POLRI

- **TEPAT** : Tertib, Efektif-efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya
- **TEPAT:**
 - TEPAT WAKTU
 - TEPAT MUTU
 - TEPAT SUBYEK
 - TEPAT OBYEK
 - TEPAT ATURAN



TAGLINE PUSKEU POLRI DALAM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WWBM PELAYANAN TANPA TATAP MUKA DAN BEBAS BIAYA



NO KORUPSI

PUSKEU POLRI MELAYANI
PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN
TANPA TATAP MUKA
DAN
BEBAS BIAYA

LAYANAN TANPA TATAP MUKA
LAYANAN BEBAS BIAYA

TEPAT

[puskeu.polri.go.id](#) [zi.puskeu.polri.info](#) [puskeu.polri](#)
[puskeu.polriofficial](#) [@puskeu.polri](#)



BIDANG PEMBIAYAAN PUSKEU POLRI MELAYANI

1. Penyaluran Dana Tunkin
2. Pembayaran Dana Direktif Kapolri dan Dukops Polri
3. Pembayaran Dana Samsat, JR dan FPU
4. Pembiayaan Sumber PLN dan PDN

LAYANAN TANPA TATAP MUKA
LAYANAN BEBAS BIAYA

TEPAT Bersih, Efektif, Efisien, Partisipatif, Akuntabel, Tanggung

[puskeu.polri.go.id](#) [zi.puskeu.polri.info](#) [puskeu.polri](#)
[puskeupolriofficial](#) [PUSKEU POLRI](#)

PELAYANAN BERBASIS SPBE



TH 2021 Puskeu Presisi 1.0 pengembangan aplikasi dasar keuangan



TH 2022 Puskeu Presisi 2.0 pengembangan Aplikasi Keuangan Dengan Interkoneksi Sakti



TH 2023 Puskeu Presisi 3.0 pengembangan aplikasi dengan migrasi ke Divtik dan interoperable Satker Mabes dan Polda, Pembayaran tunjangan langsung ke anggota, e-office dan penggunaan cms perbankan

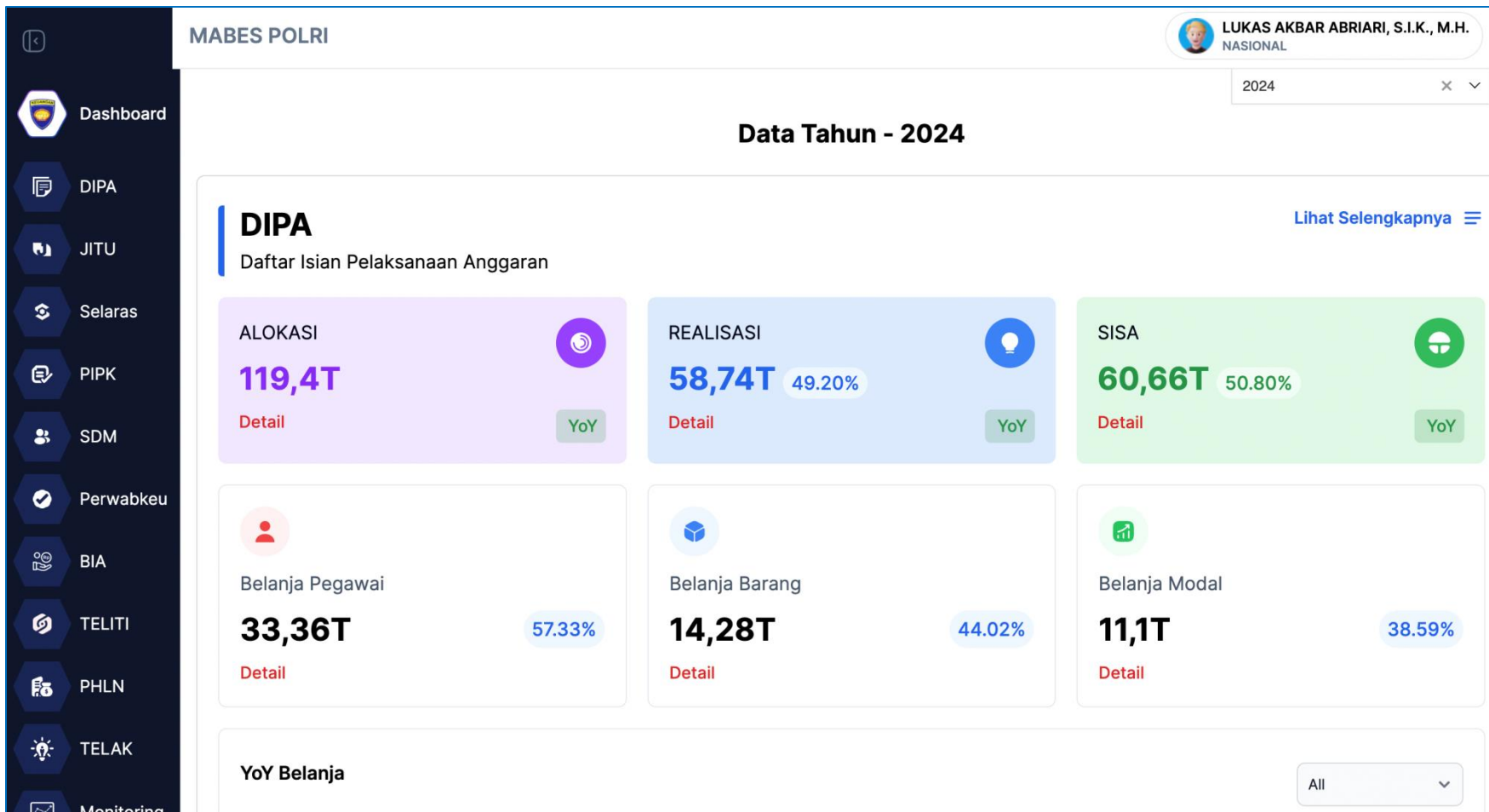


TH 2024 Puskeu Presisi 4.0 updating aplikasi Puskeu Presisi dan penambahan modul bidang pembiayaan



TH 2025 Puskeu Presisi 5.0 Aplikasi Keuangan Dengan Basis A.I

APLIKASI PUSKEU PRESISI



6 PROGRAM ZI

KAPUSKEU POLRI
BRIGJEN POL. LUKAS AKBAR
ABRIARI, S.I.K., M.H.
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB

KABID APK PUSKEU POLRI
KOMBES POL. ZULFIKAR A, SE.,
S.Ked., M.Si.
SELAKU
KETUA PELAKSANA

VERIFIKATOR KEUANGAN TK III
KOMBES POL I WAYAN KRISNA,
ST., MT.
SELAKU
SEKRETARIS

01 MANAJEMEN PERUBAHAN

02 PENATAAN TATA LAKSANA

03 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

04 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

05 PENGUATAN PENGAWASAN

06 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KOMBES POL MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.

KOMBES POL HERUJITO, S.E., M.Ak.

KOMBES POL ANDI MAYANGKARA, S.E.

AKBP INDRA RAMBITAN, S.E.

KOMBES POL KUTARTO, S.E., M.H.

KOMBES POL RONNY AZWAWIE, S.H., S.I.K.

INOVASI KOMPONEN PENGUNGKIT

PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS



1. MANAJEMEN PERUBAHAN

2

PENATAAN TATA LAKSANA

3

PENATAAN MANAJEMEN SDM

4

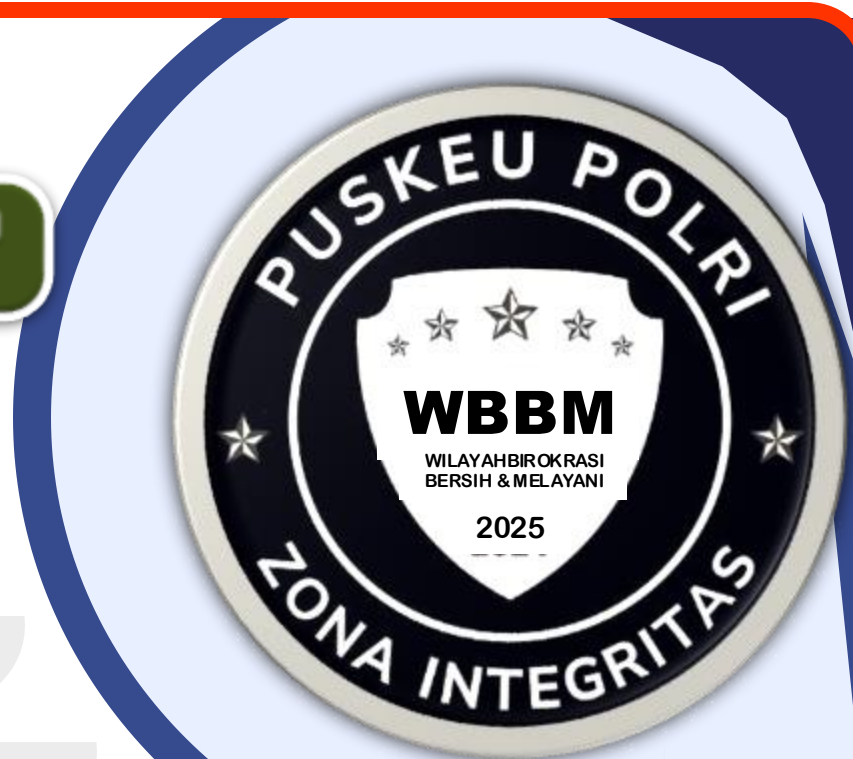
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

5

PENGUATAN PENGAWASAN

6

PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK



PEMBENTUKAN TIM PEMB. ZI MENUJU WBBM

PERMASALAHAN



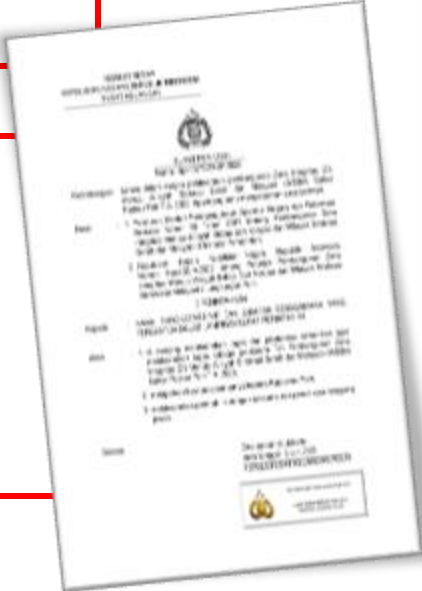
- Belum terbentuknya Tim Pembangunan ZI menuju WBBM
- Belum adanya SOP pembentukan Tim Pemb. ZI menuju WBBM
- Belum adanya sprin pembentukan Tim Pemb. ZI menuju WBBM



- Terbentuknya Tim Pembangunan ZI menuju WBBM
- Terbentuknya SOP Pembentukan Tim Pemb. ZI menuju WBBM
- Tersusunnya Sprin Tim Pemb. ZI menuju WBBM

BENTUK KEGIATAN

- Penentuan Anggota Tim Sesuai Prosedur;
- Penyusunan Sprin Tim Pembangunan Zi menuju WBBM



MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN		Nomor SOP : SOP/III/2023/Puskeu Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2023 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : 15 Januari 2023 Disahkan Oleh : 
		Nama SOP : MEKANISME PEMBENTUKAN TIM ZI
Dasar Hukum:	Kriteria Anggota Tim:	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/265/II/2021 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri.	1. Berstatus sebagai Anggota Polri/ASN Puskeu Polri 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin 3. Taat aturan Disiplin dan Kode Etik 4. Bertanggungjawab 5. Memiliki kinerja yang baik dan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi 6. Inovatif dan Proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:	
-	1. Komputer, Laptop, Printer, Scanner	
Peringatan:	Pencatatan Dan Pendaftar:	
Apabila Anggota tim Zi tidak melalui proses pemilihan/seleksi sesuai prosedur yang berlaku maka dapat berdampak pada kinerja Pokja Zona Integritas.	Softcopy dan hardcopy	

SOSIALISASI PEMB. ZI MENUJU WBBM

PERMASALAHAN

BEFORE

- Perlu Adanya Inovasi Pengembangan sosialisasi kpd seluruh Personel;
- Masih Belum Terintegrasi Terkait Sosialisasi Pembangunan Zi

BENTUK KEGIATAN

- Pembuatan Tag Line
- Pemasangan Spanduk & Banner di Lingkungan Kerja
- Sosialisasi Kepada Personel & Masyarakat
- Giat Road Show Program dan Inovasi Pembangunan Zi

AFTER

- Terbentuknya Tag Line Layanan Tanpa Tatap Muka dan Layanan Bebas Biaya
- Terpasangnya Spanduk & Banner di Lingkungan Kerja
- Tersosialisasikannya Program dan Giat Inovasi Pembangunan Zi



PIMPINAN SBG ROLE MODEL

BEFORE

PERMASALAHAN

- Perlu Adanya kerjasama antara pihak eksternal;
- Masih Belum Terlaksana Kegiatan Kerjasama Dengan Pihak Eksternal

BENTUK KEGIATAN

- Penunjukkan Agen Perubahan
- Pimpinan Melakukan Kerjasama Dengan Stakeholder Terkait
- Pimpinan Secara Langsung Ikut Serta Melaks Giat-giat Sosia

AFTER

- Terealisasinya Kegiatan Pembangunan Zi
- Pimpinan menjadi panutan bagi bawahan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun kegiatan lain yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat



PENENTUAN TAGLINE BUDAYA KERJA PUSKEU: **“LAYANAN TANPA TATAP MUKA DAN BEBAS BIAYA”**

BEFORE

Belum ada tagline



AFTER

tagline “layanan tanpa tatap muka dan bebas biaya”

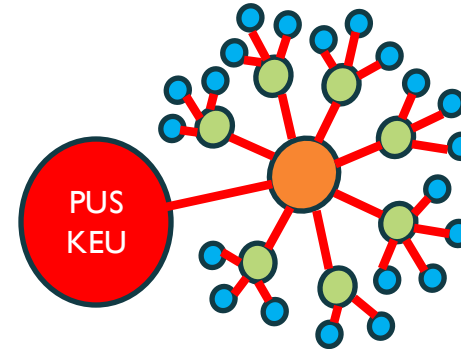


IMPLEMENTASI

I. Penyederhanaan Penyaluran Tunjkin

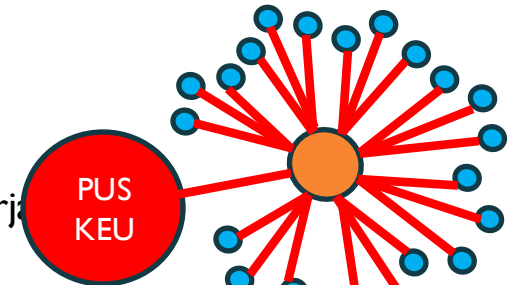
- Before

- Penyaluran : Puskeu-Bidkeu-Satker- Rek Personil
- Pengajuan dan penyaluran secara manual
- Waktu penyaluran tidak tentu
- Terbatas pada keberadaan kapuskeu selaku KPA



- After

- Penyaluran: Puskeu-Bidkeu-Rek Personel
- Pengajuan melalui app Tunjkin Puskeu Presisi, penyaluran dengan CMS perbankan, Kapuskeu dapat mengeksekusi pembayaran darimana saja
- Waktu penyaluran dipastikan setiap tanggal 16
- Anggota mendapat notif pada app Jitu (Gaji dan Tunjangan Kinerja)
- Paperless, **TANPA TATAP MUKA DAN BEBAS BIAYA**
- **KEP KAPOLRI NO 1593 /XI/2023 ttg MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TA 2023-2024**
- **SOP NOMOR: SOP/113/V/2024/PUSKEU TANGGAL 22 MEI 2024 TENTANG MEKANISME PERMINTAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA POLRI MELALUI APLIKASI PUSKEU PRESISI**



Testimoni



<https://www.instagram.com/reel/C6VcykgvfIP/?igsh=MW4zdWxjMnp5aG11bA%3D%3D>



<https://www.instagram.com/reel/C7L68gRPky9/?igsh=MTJnbWtjMGVocWR0aw%3D%3D>

2. Percepatan penyaluran Dana Samsat

- Before
 - Verifikasi data dan proses pencairan membutuhkan waktu 5 s.d. 7 hari Kerja sejak berkas pencairan diterima Puskeu
 - Proses tanda tangan kapuskeu dilakukan secara manual
 - Pengajuan dan penyaluran secara manual dan tunai, masih terjadi tatap muka antar satker
 - Penyaluran terbatas pada jam operasional bank
- After
 - Verifikasi data dan proses pencairan membutuhkan waktu 1 s.d. 3 hari sejak berkas pencairan diterima Puskeu **MENGGUNAKAN APLIKASI SELARAS**
 - Proses validasi secara online
 - Menggunakan CMS account to account dan dapat dilakukan sepanjang waktu
 - Paperless , **TANPA TATAP MUKA DAN BEBAS BIAYA**
 - **Diatur dengan SOP no SOP/061//XI/2021/Puskeutanggal 2 November 2021 Tentang SOP pemeriksaan dan pembayaran Dana Samsat**

3. PERCEPATAN PENYALURAN ANGGARAN DIREKTIF KAPOLRI

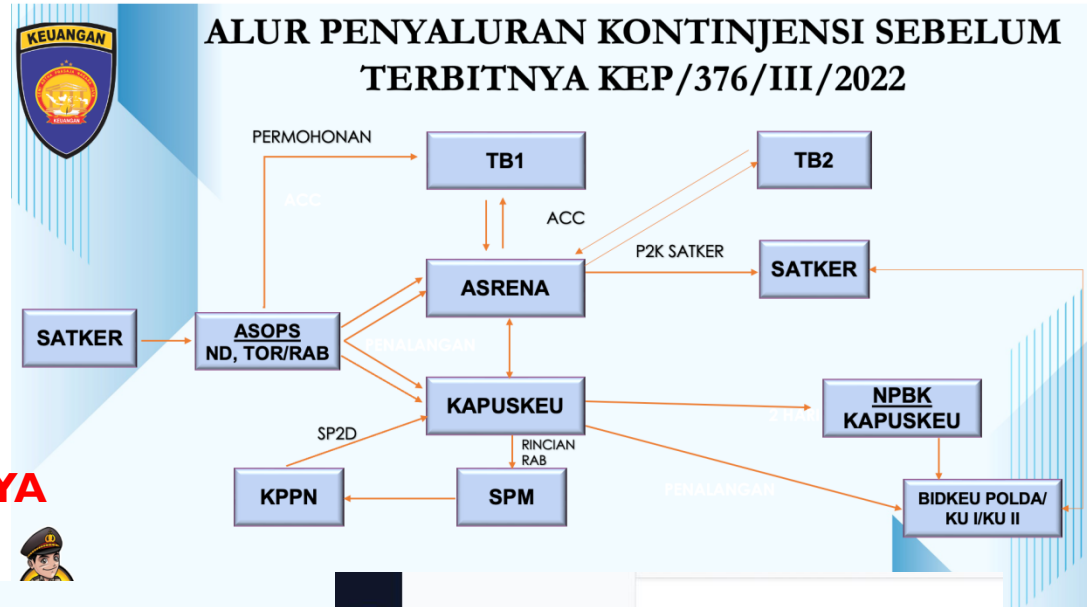


BEFORE

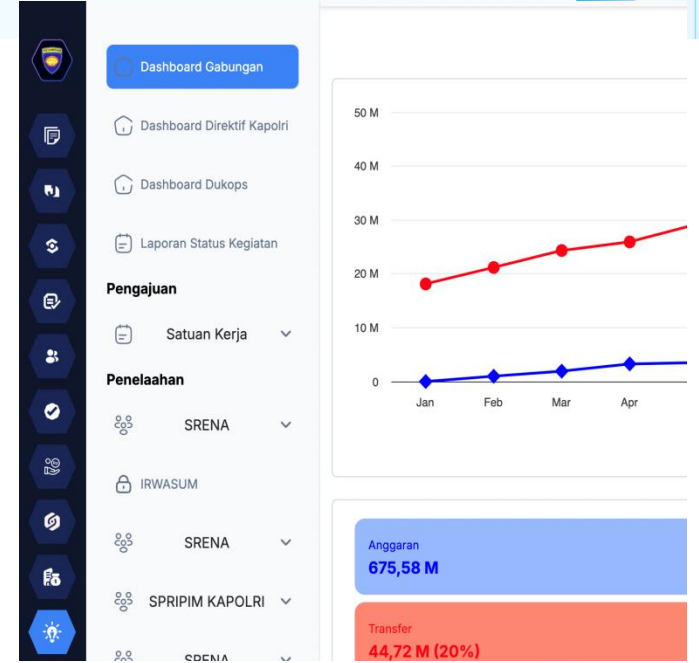
- MEMAKAN WAKTU LAMA
- KURANG AKUNTABEL

AFTER

- LEBIH SINGKAT
- LEBIH AKUNTABEL
- MENGUNAKAN MODUL APPTELAK DAN SELARAS,
- TANPA TATAP MUKA, BEBAS BIAYA**



ALUR PENYALURAN SAAT INI



4. PENCEGAHAN PAGU MINUS/ KURANG PAGU DALAM PEMBIAYAAN KEGIATAN SUMBER PINJAMAN LUAR NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 1505 /IX/2021

tentang

OTORISASI PENERBITAN SERTIFIKAT PEMBAYARAN
(CERTIFICATE OF PAYMENT)
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PINJAMAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas pembiayaan Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan otorisasi penerbitan Sertifikat Pembayaran (*Certificate of Payment*), dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

• BEFORE

- TIAP TAHUN SELALU TERJADI PAGU MINUS YANG BERPOTENSI MENJADI TEMUAN BPK DAN MENUNJUKKAN KEKURANG EFEKTIFAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN BERSUMBER PINJAMAN LUARA NEGERI

• AFTER

- DITERBITKAN KEP NO 1505/IX/2021 TENTANG PENERBITAN CERTIFICATE OF PAYMENT
- CERTIFICATE OF PAYMENT MENJADI INSTRUMEN UNTUK MENGENDALIKAN PEMBAYARAN PROYEK-PROYEK YANG KURANG PAGU NYA SEHINGGA TIDAK TIDAK TERJADI KURANGPAGU PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
- DIKELUARKAN OLEH PUSKEU, **TANPA TATAP MUKA DAN BEBAS BIAYA**



5. PENERBITAN L/C DAN SKB

- BEFORE
 - MANUAL, DOKUMEN DIANTAR OLEH PEMOHON
- AFTER
 - DIKIRIM MELALUI MODUL “SELARAS” PUSKEU PRESISI
 - MENGGUNAKAN TTE
 - DIKIRIM KE BANK INDONESIA (UNTUK L/C) / BEA CUKAI (UNTUK SKB) SECARA ONLINE
 - TANPA TATAP MUKA DAN BEBAS BIAYA
 - DIATUR DENGAN SOP NO: SOP/066/XI/2021/Puskeu TANGGAL 2 NOVEMBER 2021 TENTANG SOP PENERBITAN SERTIFIKAT PEMBAYARAN (CERTIFICATE OF PAYMENT)

Testimoni



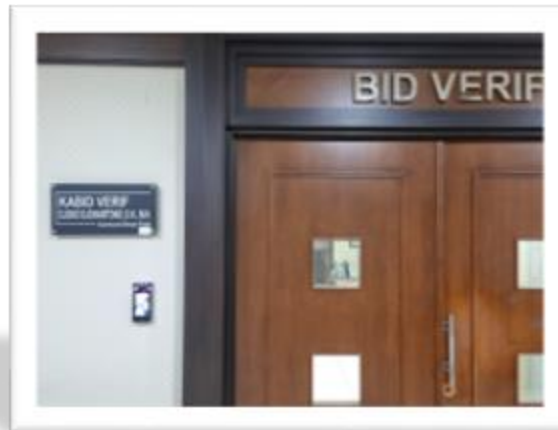
<https://www.instagram.com/reel/C6-1MuAvbOK/?igsh=cTMwNTN3bWlyb2N4>



https://www.instagram.com/reel/C65nE6_PIRY/?igsh=anN2NGpkcTZ4dWNz

6. PENGGUNAAN KUNCI AKSES DI SETIAP PINTU

- di terapkan untuk mencegah kehadiran pihak yang tidak dikehendaki termasuk pelanggan/customer untuk masuk ke area kerja personel
- menerima tamu pada tempat yang disediakan pada tempat terbuka di selasar ber cctv



PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI CLEARANCE (SKHP) PERSONEL PUSKEU POLRI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

BEFORE

Baru ada pengajuan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) Personel Puskeu Polri kepada Karo Paminal Div Propam Polri

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
Nomor : R/15/VI/KEU/2024/Puskeu
Klasifikasi: Rahasia
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penerbitan Rekomendasi Clearance (SKHP) Personel Puskeu Polri.

Kepada
Yth. KAROPAMINAL
DIV PROPAM POLRI
di
Jakarta

1. Rujukan:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2658/2021 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Lingkungan Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dimohon kepada Jenderal menerbitkan Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Clearance (SKHP) personel Puskeu Polri sebagaimana terlampir, sebagai agen perubahan tim pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) Saterk Puskeu Polri T.A. 2024;
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Ditandatangani secara elektronik
LUKAS AKBAR ABRARI S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:
1. Kapoti,
2. Wakapoti.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN POLRI
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

LAMPIRAN SURAT KAPUSKEU POLRI
NOMOR : R/15/VI/KEU/2024/Puskeu
TANGGAL : 23 April 2024

DAFTAR NAMA PERSONEL PUSKEU POLRI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM TIM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBMM) SATERK PUSKEU POLRI T.A. 2024.

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	RONNY AZWAWIE, S.H., S.I.K.	KOMBES POL	74060404	KABIDBIA PUSKEU POLRI	
2	SYNTHIA NURADIANI, S.I.P., M.M.	KOMPOL	83041374	PS. KASLUBBID NON APBN BID BIA	
3	PURI NINDI PRASITA, S.Pn.	IPDA	96071229	PS. PAMIN SUBBID APBN BIDBIA	

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Ditandatangani secara elektronik
LUKAS AKBAR ABRARI S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:
1. Kapoti,
2. Wakapoti.

AFTER

Hasil penerbitan rekomendasi clearance (SKHP) Personel Puskeu Polri dari Karo Paminal Div Propam Polri

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor: SKHP-0512-P/IV/2024/LIT

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri,
2. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Catatan Personil bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa hasil penelitian terhadap:
a. nama : **RONNY AZWAWIE, S.H., S.I.K.**
b. tempat dan tgl. lahir : **Cimahi, 10/06/1974**
c. jenis kelamin : **Laki - Laki**
d. agama : **Islam**
e. pangkat/NRP/NIP : **Kombes Pol/74060404**
f. jabatan : **Kabid BIA**
g. kesatuan : **Puskeu Polri**
h. alamat kantor : **Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110**

yang bersangkutan Tidak Memiliki catatan pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri, sehingga:
Memenuhi syarat untuk sebagai Agen Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) Saterk Puskeu Polri T.A. 2024

3. Hasil penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keterangan Hasil Penelitian ini akan dicabut.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 30 April 2024
a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
KAROPAMINAL

ANGGRO SUKARTONO, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:
KAPUSKEU POLRI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor: SKHP-0513-P/IV/2024/LIT

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri,
2. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Standar Operasional Prosedur Catatan Personil bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa hasil penelitian terhadap:
a. nama : **SYNTHIA NURADIANI, S.I.P., M.M.**
b. tempat dan tgl. lahir : **Bandung, 26/04/1983**
c. jenis kelamin : **Perempuan**
d. agama : **Kristen**
e. pangkat/NRP/NIP : **KOMPOL/83041374**
f. jabatan : **Pl. Kasubbid Non APBN Bid BIA**
g. kesatuan : **Puskeu Polri**
h. alamat kantor : **Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110**

yang bersangkutan Tidak Memiliki catatan pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri, sehingga:
Memenuhi syarat untuk sebagai Agen Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) Saterk Puskeu Polri T.A. 2024

3. Hasil penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, surat keterangan hasil penelitian ini akan dicabut.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 30 April 2024
a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
KAROPAMINAL

ANGGRO SUKARTONO, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:
KAPUSKEU POLRI



puskeu.polri.go.id | zi.puskeu.polri.info
puskeupolriofficial | PUSKEU POLRI
puskeu.polri

LAYANAN TANPA TATAP MUKA
LAYANAN BEBAS BIAYA



PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL

PUSKEU POLRI MENERIMA PENGHARGAAN ATAS PENGELOLAAN LETTER OF CREDIT (LC) YANG TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL.

KAPUSKEU MENDAPATKAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DALAM BENTUK VIRTUAL ACCOUNT (VA)

KAPUSKEU MENERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENKOPEREKONOMIAN DALAM PENYALURAN ANGGARAN BTPKLW



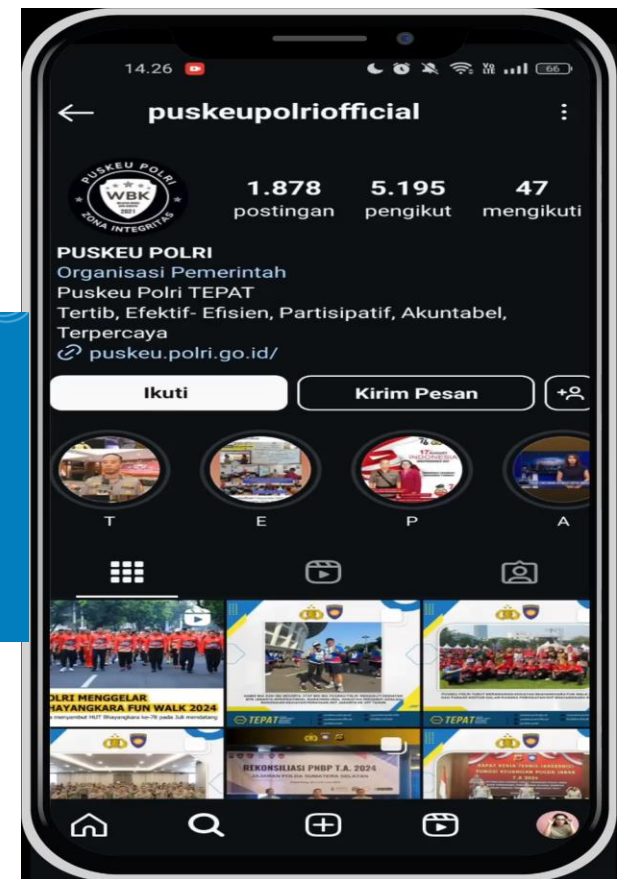
SOSIALISASI MELALUI MEDSOS

BEFORE

MEDIA SOSIAL BELUM
MEMPOSTING VIDEO
TESTIMONI DARI
STAKEHOLDER

AFTER

MEDIA SOSIAL
PUSKEU
MEMPOSTING INFO
KEUANGAN DAN
TESTIMONI DARI
STAKEHOLDER



INOVASI KOMPONEN PENGUNGKIT

PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS

1

MANAJEMEN PERUBAHAN



PENATAAN TATA LAKSANA

3

PENATAAN MANAJEMEN SDM

4

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

5

PENGUATAN PENGAWASAN

6

PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK



PENATAAN SOP PELAKSANAAN TUGAS



TELAH DISUSUN 109 SOP PADA MASING-MASING BIDANG / SUBBAG DI PUSKEU POLRI YANG MELIPUTI PEMBINAAN SDM, KINERJA PEGAWAI DAN PROSEDUR TATA KERJA.

NO.	BID/SUBBAG	JUMLAH SOP
1	BIDANG PEMBIAYAAN	18
2	BIDANG PENGENDALIAN	11
3	BIDANG AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN	12
4	BIDANG VERIFIKASI	8
5	SUB BAGIAN SUMBER DAYA	13
6	SUB BAGIAN PERENCANAAN	14
7	SUB BAGIAN PEMBINA FUNGSI	8
8	URUSAN TATA USAHA	5
9	URUSAN KEUANGAN	10
10	BIDANG KEUANGAN I & II	10
JUMLAH		109



PUSAT KEUANGAN POLRI MELAKSANAKAN KEGIATAN ANALISA DAN EVALUASI SOP SATKER PUSKEU POLRI

ADAPUN HASIL ANEV TERSEBUT MENGHASILKAN PERBAIKAN SOP:

1. MEKANISME PERMINTAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA POLRI MELALUI APLIKASI PUSKEU PRESISI
2. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA DIREKTIF KAPOLRI
3. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN POLRI

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN	
Nomor SOP	SOP / 19 / V / 2024 / PUSKEU
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	22 Mei 2024
Disahkan Oleh	 KAPOLRI POLRI
Nama SOP	Mekanisme Permintaan dan Penyaluran Tunjangan Kinerja Poli Melalui Aplikasi Puskeu Presisi
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2016 tanggal 30 Oktober 2016 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan poli; 2. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Poli;	1. Memahami tentang pengelolaan keuangan 2. Memahami tentang peraturan keuangan 3. Memahami tentang komputer
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. Untuk peningkatan kinerja di lingkungan Poli 2. Laporan keuangan 3. Pelaksanaan penyaluran tunjangan kinerja	1. Literatur / referensi peraturan perundang-undangan; 2. Komputer, Laptop, Printer, Scanner
Peringatan:	Pencatatan Dan Pendataan:
Masih terdapat permasalahan NRP Ganda, Doble permintaan tunjuk, dan Pengajuan NRP Pensiun,	Hardcopy dan Softcopy



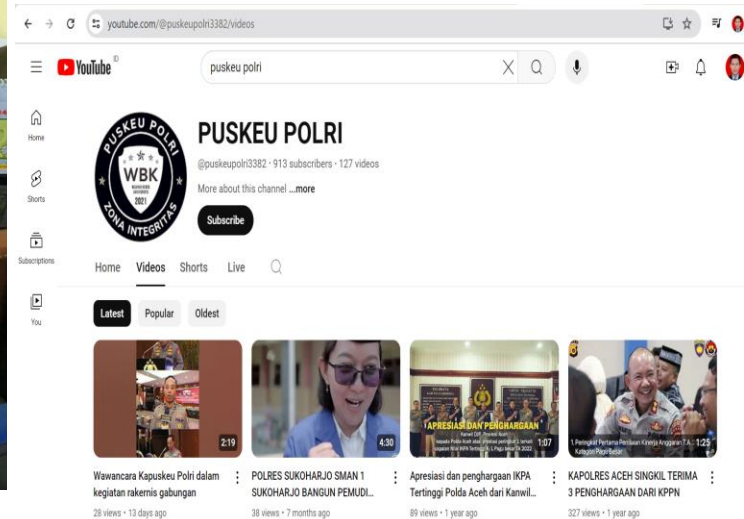
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BEFORE

AFTER

PELAYANAN DAN INFORMASI SECARA MANUAL, TATAP MUKA/OFF LINE

- MASYARAKAT LEBIH MUDAH MENGAKSES INFORMASI KEUANGAN POLRI MELALUI MEDSOS YANG ADA MELALUI WEBSITE PUSKEU.POLRI.GO.ID, DAN BERITA KEGIATAN PUSKEU DI INSTAGRAM, TWITTER DAN FACEBOOK
- WEBSITE PUSKEU POLRI TELAH MENJADI RUJUKAN MEDIA MASSA MAINSTREAM MENYANGKUT INFO PENGELOLAAN KEUANGAN



TEPAT

MENGOPTIMALKAN POTENSI PERSONEL

BEFORE

AFTER

Efektivitas, efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing unit kerja belum menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

PEMBANGUNAN APLIKASI PUSKEU PRESISI DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PUSKEU DAN MENJARING MASUKAN DARI PERSONIL DAN BEBERAPA MODUL YANG DIBANGUN ANGGOTA SENDIRI

SIPK

SISTEM KENAIKAN PANGKAT

RAHASIA

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEMERINTAHAN NOMOR : 627/SE/1989 TANGGAL : 11 FEBRUARI 1989

DINAS _____ JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : Januari s/d Desember 2011

- YANG DINILAI

a. Nama	
b. NIP	
c. Pangkat, Golongan Ruang	
d. Jabatan / Pekerjaan	
e. Unit Organisasi	
- PEJABAT PENILAI

a. Nama	
b. NIP	
c. Pangkat, Golongan Ruang	
d. Jabatan / Pekerjaan	
e. Unit Organisasi	
- ATASAN PEJABAT PENILAI

a. Nama	
b. NIP	
c. Pangkat, Golongan Ruang	
d. Jabatan	
e. Unit Organisasi	

RAHASIA

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

JANGKA WAKTU PENILAIAN Bulan Januari s.d. Desember 2009

- YANG DINILAI

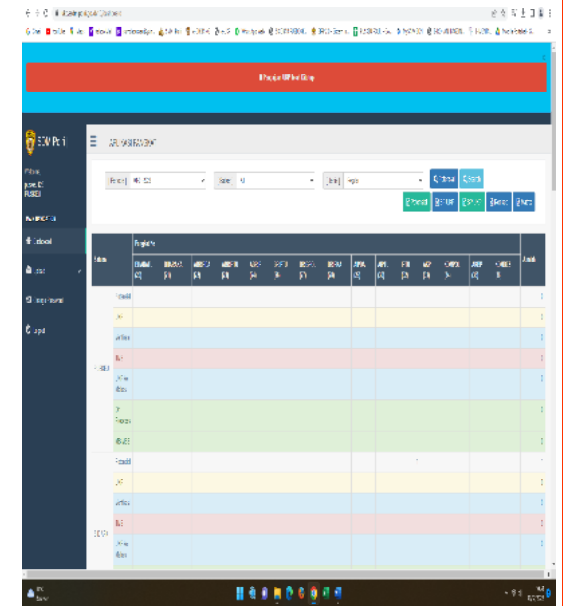
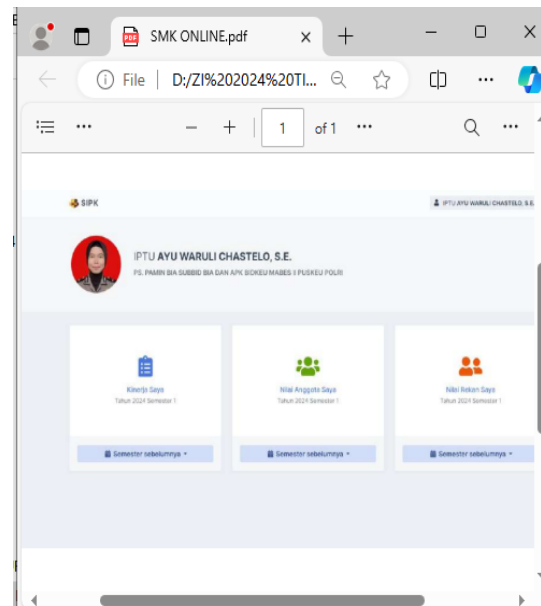
a. Nama	RIENA LAHINTA
b. NIP	1967081108021000
c. Pangkat, Golongan Ruang	PENATA MUDA, IIIa
d. Jabatan/Pekerjaan	REKAM PELAKSANA LAMBITAN
e. Unit Organisasi	DINAS KEBERHAASAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
- PEJABAT PENILAI

a. Nama	Arg MADE PRIYADI
b. NIP	19670807200211000
c. Pangkat, Golongan Ruang	PENATA, IIIc
d. Jabatan/Pekerjaan	KEPALA POKOKREKAM TINOMBO
e. Unit Organisasi	DINAS KEBERHAASAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
- ATASAN PEJABAT PENILAI

a. Nama	dr. MUHAMMAD JUSRI AMRAN, M.Kes
b. NIP	195904211980121001
c. Pangkat, Golongan Ruang	PENYERA UTAMA MEDA, IVa
d. Jabatan/Pekerjaan	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PARIGI MOUTONG
e. Unit Organisasi	DINAS KEBERHAASAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
- PENILAIAN

UNSUR YANG DINILAI	ANGKA	NILAI	SEBESAR	KETERANGAN
a. Keaktifan	91	Baik		
b. Prestasi Kerja	78	Baik		
c. Tanggapan, Berekspansi	78	Baik		
d. Ketepatan	78	Baik		
e. Efisiensi	78	Baik		
f. Kerjasama	77	Baik		
g. Program	78	Baik		
h. Keramahan	-	Baik		
Jumlah	558	Baik		
Nilai Rata-Rata	79,71	Baik		

RAHASIA



puskeu.polri.go.id | zi.puskeu.polri.info
 puskeupolriofficial | PUSKEU POLRI
 puskeu.polri

LAYANAN TANPA TATAP MUKA
 # LAYANAN BEBAS BIAYA



INOVASI KOMPONEN PENGUNGKIT

PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS

1

MANAJEMEN PERUBAHAN

2

PENATAAN TATA LAKSANA



PENATAAN MANAJEMEN SDM

4

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

5

PENGUATAN PENGAWASAN

6

PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK



PENGEMBANGAN PERSONEL BERBASIS KOMPETENSI

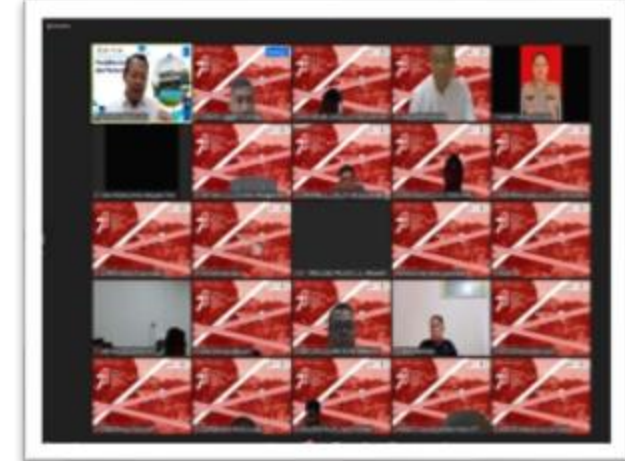
Permasalahan

- PENGLOLAAN KEUANGAN NEGARA MEMBUTUHKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN YANG KOMPETEN
- KOMPETENSI PEJABAT DIMAKSUD DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
- PARA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN POLRI KHUSUSNYA PPK DAN PPSPM SEBAGIAN BESAR BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
- DIPERLUKAN TEROBOSAN BESAR UNTUKMENINGKATKAN KOMPETENSI PPK DAN PPSPM

AFTER

Saat ini seluruh PPK dan PPSPM 1442 satker Polri telah disertifikasi

DIKLAT SERTIFIKASI PPK DAN PPSPM T.A. 2023



BEFORE

TEPAT

I. Pelaksanaan Diklat Sertifikasi PPK T.A. 2023 secara online dengan jumlah lulus 1.508 orang.

- Angkatan I lulus sebanyak 387 orang
- Angkatan II lulus sebanyak 384 orang
- Angkatan III lulus sebanyak 333 orang
- Angkatan IV lulus sebanyak 404 orang

2. Pelaksanaan Diklat Sertifikasi PPSPM T.A. 2023 secara online dengan jumlah lulus 1.298 orang.

- Angkatan I lulus sebanyak 329 orang
- Angkatan II lulus sebanyak 237 orang
- Angkatan III lulus sebanyak 315 orang
- Angkatan IV lulus sebanyak 417 orang

PENGEMBANGAN PERSONEL BERBASIS KOMPETENSI

AFTER

DIKLAT CALON BENDAHARA PENGELUARAN T.A. 2023/2024

Permasalahan

- a. BENDAHARA PENGELUARAN MERUPA SEBAGIAN BESAR SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
- b. NAMUN DENGAN DINAMIKA PENUGASAN, BANYAK YANG SUDAH MUTASI, SERTIFIKAT EXPIRED, PENSUN DLLL
- c. DIPERLUKAN KADERISASI CALON BENDAHARA PENGELUARAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BENDAHARA NEGARA TERSERTIFIKASI (BNT);



1. Diklat Calon Bendahara Pengeluaran dilingkungan Polri T.A. 2023 sebanyak 310 orang yang sudah lulus sertifikasi BNT (lulus 100%).

2. Diklat Calon Bendahara Pengeluaran dilingkungan Polri Angkatan I & II T.A. 2024 pada tanggal 1 sd. 6 Juli 2024 dan 5 sd 9 Agustus sebanyak 292 orang yang sudah lulus sertifikasi BNT (lulus 100%).



Pada TA 2024 utk pertama kali akan dilaksanakan sertifikasi untuk Bendahara Penerimaan

BEFORE

TEPAT

INOVASI KOMPONEN PENGUNGKIT

PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS

1 MANAJEMEN PERUBAHAN

2 PENATAAN TATA LAKSANA

3 PENATAAN MANAJEMEN SDM

4  Penguatan Akuntabilitas Kinerja

5 Penguatan Pengawasan

6 Peningkatan Kualitas YAN Publik



KETERLIBATAN PIMPINAN DALAM PENYUSUNAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PUSKEU POLRI

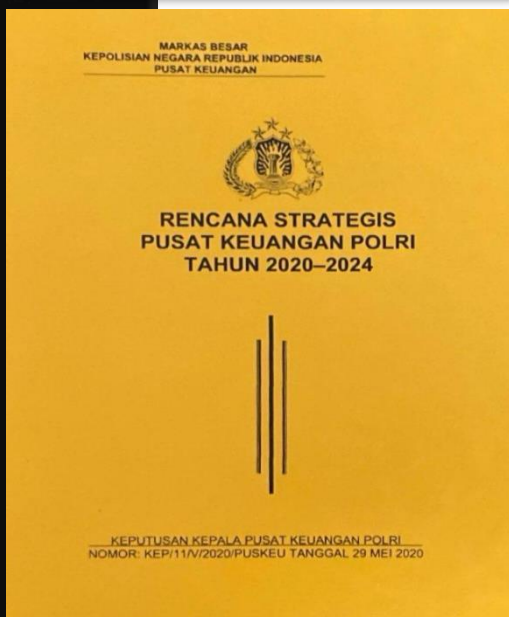
TELAH DILAKUKAN REVIU DOKUMEN LIMA TAHUNAN (RENSTRA PUSKEU POLRI THN 2020-2024) PADA AKHIR TAHUN 2021.

HASIL EVALUASI KEMENPAN dan RB R.I. :

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/110/AA.04/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021

AFTER

BEFORE



- puskeu.polri.go.id
- puskeupolriofficial
- puskeu.polri
- zi.puskeu.polri.info
- [PUSKEU POLRI](#)

LAYANAN TANPA TATAP MUKA
LAYANAN BEBAS BIAYA



PERUBAHAN RENSTRA PUSKEU POLRI

BEFORE

VISI



Menjadi Pembina Fungsi Keuangan yang Modern dan Unggul

KEP KAPUSKEU NO : KEP/22/XI/2021 TGL 3 NOV 2021 TTG RENSTRA PUSKEU POLRI TH 2020-2024

MISI



1. Memperkuat pembinaan fungsi Keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
2. Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan polri yang transparan dan akuntabel;
3. Memperkuat system jemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya

AFTER

VISI



Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Polri yang *modern*, terintegrasi, profesional dan akuntabel

RANCANGAN RENSTRA PUSKEU POLRI TAHUN 2025-2029

MISI



1. Membangun sistem pengelolaan keuangan Polri dan pembinaan fungsi keuangan berbasis teknologi yang terintegrasi;
2. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Polri secara profesional; dan
3. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Polri yang andal

PELAKS & HSL NILAI EVALUASI AKIP PUSKEU POLRI

BEFORE

AFTER

Rekomendasi Tim Evaluator AKIP Itwasum Polri
Agar semua unit kerja dalam pengumpulan data pencapaian kinerja menggunakan Aplikasi atau Digitalisasi (TIDAK MANUAL)

PENGUMPULAN DATA PENCAPAIAN KINERJA TELAH MENGGUNAKAN APLIKASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Catatan	Rekomendasi
1 PERENCANAAN KINERJA					
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	8,18	6,00	TERDAPAT DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG KINERJA.	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	8,20	9,00	a. DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA TELAH MENGGAMBARAKAN KEBUTUHAN ATAS KINERJA SEBENARNYA YANG PERLU DICAPAI. b. TARGET YANG DITETAPKAN DALAM PERENCANAAN KINERJA DAPAT DICAPAI MENANTANG DAN REALISTIS.	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	8,00	15,00	TERDAPAT PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA DALAM MEWUJUDKAN KONDISI HASIL YANG LEBIH BAIK.	
2 PENGUKURAN KINERJA					
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	8,00	6,00	DALAM PENGUMPULAN DATA PENCAPAIAN AGAR SEMUA UNIT KERJA DALAM KINERJA PER UNIT KERJA BELUM PENGUMPULAN DATA PENCAPAIAN KINERJA DILAKUKAN SECARA DIGITAL (APLIKASI MENGGUNAKAN APLIKASI ATAU DIGITALISASI).	DIGITALISASI.
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	8,02	9,00		

REKAP NPHPW POLDA



PEMBERIAN *REWARD & PUNISHMENT*

BEFORE

Hasil capaian / monitoring Perjanjian Kinerja Tahun 2021 **BELUM** dijadikan dasar pemberian *Reward and Punishment* di lingkungan Polri.

AFTER

Hasil capaian / monitoring Perjanjian Kinerja Tahun 2023 - 2024 **TELAH** dijadikan dasar pemberian *Reward and Punishment* di lingkungan Polri.





MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM

NILAI EVALUASI AKIP PUSKEU POLRI

HASIL DAN REKOMENDASI
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PUSKEU POLRI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Before	After
			Nilai AKIP	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,74	24,58
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,50	23,92
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,96	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,47	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,67	80,10
GRADE			BB	A



PUSKEU POLRI "TEPAT" Tertib, Efektif-Efisen, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya

PUSKEU POLRI SIAP MENUJU WBBM TH 2025

INOVASI KOMPONEN PENGUNGKIT

PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS

1 MANAJEMEN PERUBAHAN

2 PENATAAN TATA LAKSANA

3 PENATAAN MANAJEMEN SDM

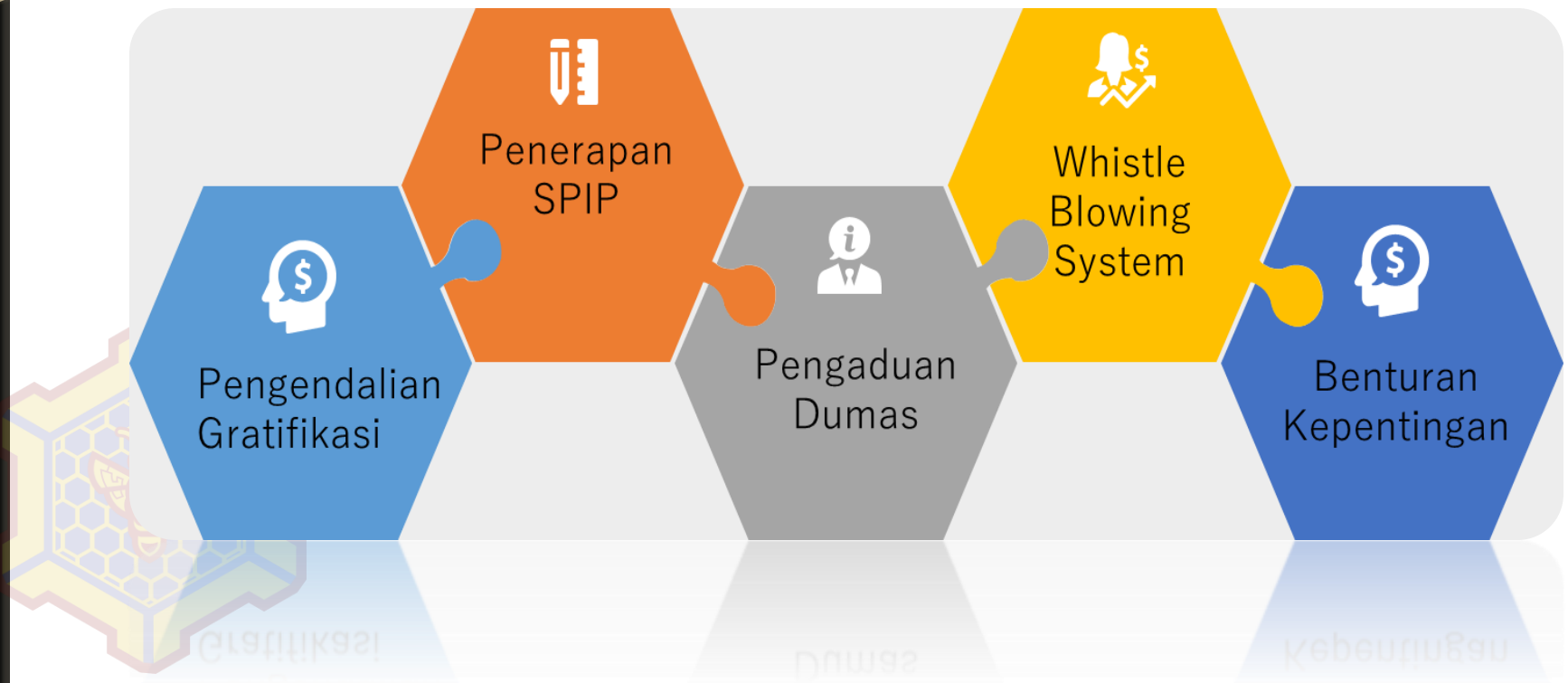
4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

5 PENGUATAN PENGAWASAN

6 PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK



INDIKATOR Penguatan Pengawasan



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PERMASALAHAN

BEFORE

- Masih minimnya pemahaman tentang gratifikasi
- Belum adanya personel yg ditunjuk sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) satker

BENTUK KEGIATAN

- Pelaks sosialisasi Perkap No 6 Thn 2020;
- Pembuatan banner larangan gratifikasi;

AFTER

- Telah Diterbitkan Sprin Kapuskeu Polri Terkait Tim UPG Puskeu Polri Tahun 2025



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

LAMPIRAN SPRIN KAPUSKEU POLRI
NOMOR : Sprin/1000/KEU/PUSKEU
TANGGAL: 23 Februari 2025

TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI

NO	NAMA	KEPANTAIAN	KET
1	KAPUSKEU POLRI	PENANGGUNG JAWAB	
2	SESUSKEU POLRI	KETUA	
3	KASUBBAGSUMDA SET PUSKEU POLRI	SEKRETARIS	
4	KAURMIN BIDIA PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
5	KAURMIN BIDAPK PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
6	KAURMIN BIDDAL PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
7	KAURMIN BIDVERIF PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
8	PAURMIN BIDKEU MABES I PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
9	PAURMIN BIDKEU MABES II PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
10	PAMIN SUBBAGREN SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
11	PAMIN SUBBAGINFUNG SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
12	PAMIN SUBBAGSUMDA SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
13	PAMIN URTU SET PUSKEU POLRI	ANGGOTA	
14	PAMIN VERIF URKEU PUSKEU POLRI	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama Lengkap : LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
Pangkat : BRIGADIR JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
Unit Kerja : PUSKEU POLRI

Menyatakan bahwa pada periode Januari s.d. Desember 2024 saya tidak menerima Gratifikasi

No	Jenis Pemberian	Bentuk Pemberian	Waktu Pemberian	Perkiraan Nilai Pemberian	Nama dan Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1								
TIDAK ADA								

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Januari 2025

Yang Bertandatangan
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PENGADUAN MASYARAKAT

PERMASALAHAN

BEFORE

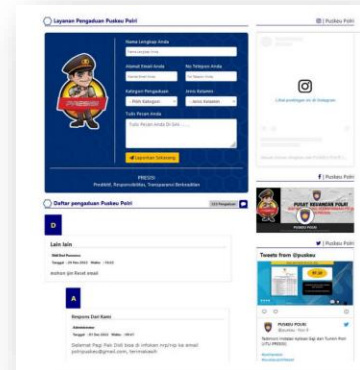
- Belum maksimalnya pelayanan pengaduan masyarakat (dumas) pada Sosmed Puskeu Polri
- Pelayanan pengaduan masyarakat hanya terfokus pada website Puskeu Polri

BENTUK KEGIATAN

- Penambahan saluran pengaduan selain dari website, bisa dilakukan ke email, no HP dan sosmed;
- pelaks anev bulanan, triwulan dan semester atas penanganan dumas di Puskeu Polri

AFTER

Pelayanan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui no HP pengaduan, email, website, dan sosmed Puskeu Polri



PUSAT KELUANGAN POLRI
BIDANG VERIFIKASI

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
SATKER PUSKEU POLRI BULAN APRIL SD JUNI 2024

NO	TANGGAL PENGADUAN	PELAPORAN	TANGGAPAN	STATUS PENANGANAN			REVISI	KBT
				DIJAWAB	DIPECAH	DIKORUSUHI		
1	18 Mei 2024	Saluran pengaduan melalui hp terdapat 2024 apakah terdapat keluhan pada puskeu polri?	Selama ini hp terdapat 2024, untuk dijawab dan dijawab oleh puskeu polri. Hal ini dapat dijawab oleh puskeu polri. Hal ini dapat dijawab oleh puskeu polri.				✓	
2	22 Juni 2024	Mohon di Jwb untuk Tawar 2024 apakah terdapat keluhan pada puskeu polri?	Puskeu polri menanggapi dan dijawab oleh puskeu polri. Hal ini dapat dijawab oleh puskeu polri.				✓	
Jumlah								

Jakarta, 3 Juli 2024

KABID VERIFIKASI
SATKER

KETUA TIM V

DIJKO DAHARSONO, S.H., M.H.
KOMISAR POLRI NRP. 67060672

WHISTLE BLOWING SYSTEM

PERMASALAHAN

BEFORE

- Kurangnya sarana dalam pengawasan terhadap personel Puskeu Polri pada pelaks WBS
- Pelaporan WBS hanya dilakukan pada menu pengaduan website Puskeu Polri

BENTUK KEGIATAN

- Pelaks sosialisasi Perkap No 21 Th 2012 ttg perlindungan thd pelapor pelanggaran hukum di lingk. Polri dan Kep Kapolri No Kep/I47/i/2020 ttg *Whistle Blowing System* (wbs) online di lingkungan Polri;
- Pelaks anev bulanan atas pelaksanaan wbs pada Puskeu Polri

AFTER

Pelaporan WBS dapat dilakukan melalui datang langsung ke Set Puskeu Polri, kotak pengaduan, telepon, media sosial dan website



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KELUARAN

LAPORAN HASIL
PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) TAHUN ANGGARAN 2024
SATKER PUSKEU POLRI

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keangan Polri Nomor: Sp/197/1/KEP/2023 tanggal 4 Februari 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistle Blowing System* di lingkungan Puskeu Polri semester I tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari DBK;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/147/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang *Whistle Blowing System* (WBS) Online di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tujuan Monitoring

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya pelanggaran yang dilakukan oleh personel Puskeu Polri;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi dan analisis apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan personel Puskeu Polri dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan.

C. Ruang Lingkup Monitoring

Ruang lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Satker Puskeu Polri melalui website.

D. Hasil Monitoring

1. Informasi Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/147/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang *Whistle Blowing System* (WBS) Online di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan bahwa pelapor dapat menyampaikan informasi secara online adanya ketidak sah tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri.

Adapun persentian pelapor WBS online:

- a. pengaduan negatif pada Polri;
- b. memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri;
- c. memiliki nomor handphone dan alamat e-mail sendiri yang bisa dikonfirmasi dan diskartifikasi.

Kewajiban pelapor WBS online:

- a. laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berprestasi manggikan kerugian negara dan kepentingan masyarakat;
- c. dapat tindak pidana korupsi yang dipaparkan memiliki perhatian dan merehabilitasi masyarakat;
- d. bersedia diskartifikasi terkait laporan tindak pidana korupsi, meliputi:
 - 1) siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana tentang laporan yang dipaparkannya;
 - 2) melampirkan data sumber informasi pada proses pendalaman.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Rekapitulasi penanganan pengaduan WBS semester I tahun 2024 sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) ONLINE SEMESTER I TAHUN 2024 SATKER PUSKEU POLRI

NO	TANGGAL	LANGKAH	KOTAK PENGADUAN	TELEPON	MEDIA SOSIAL
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI				
2	FEBRUARI				
3	MARET				
4	APRIL				
5	MAY				
6	JUNI				
	TOTAL				

E. Kesimpulan

Berdasarkan rekapitulasi hasil penanganan *Whistle Blowing System* (WBS) online pada Semester I tahun 2024 berjumlah nihil (tidak ada pengaduan) terhadap anggota Puskeu Polri yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistle Blowing System* (WBS) online tahun anggaran 2024. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Agustus 2024
KABDIKORPRIK PUSKEU POLRI
Setau
Sesuai Tim Pengawasan

DIDIK DOKHARIPOL, S.H., M.H.
KORPORAS BERSAMA POLRI NIP 81202872

BENTURAN KEPENTINGAN

PERMASALAHAN

BEFORE

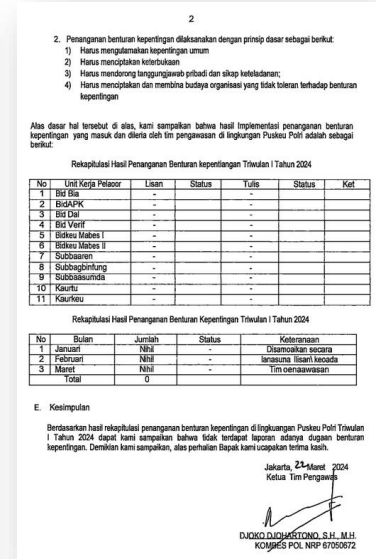
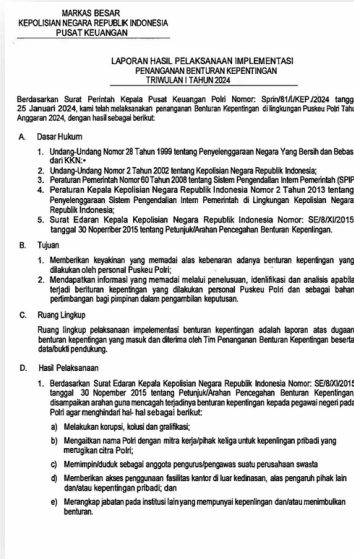
- Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman personel Puskeu Polri thdp benturan kepentingan;
- Pelaks pengawasan terhadap benturan kepentingan belum maksimal tanpa melibatkan atasan langsung

BENTUK KEGIATAN

- Pelaks sosialisasi SE Kapolri Nomor: se/8/x/2015 tentang jukrah pencegahan benturan kepentingan;
- Pelaks anev pelaks implementasi penanganan benturan kepentingan pada masing-masing bagian satker Puskeu Polri

AFTER

Pelaks pengawasan terhadap benturan kepentingan melibatkan atasan langsung



PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN (LHKPN)

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN UNTUK PERSONEL ASN MASIH MENGGUNAKAN APLIKASI SIHARKA MENPAN RB

BEFORE

AFTER

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN UNTUK PERSONEL ASN TELAH MENGGUNAKAN SPT ELEKTRONIK DIRJEN PAJAK

BUKTI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA	
DATA PRIBADI	
Nama	BAMBANG EKOWARSO
NPWP	49754896076412000
Golongan/Pangkat	7/16 - Perbina
Jabatan	PAUSI PROGAR
Eselon	II B
Unit Kerja	Pusat Polisi Kepolisian Negara
Instansi	Kepolisian Negara
INFORMASI LAPORAN	
Nomor Pelaporan	845006002
Tanggal Laporan	04 September 2022
NPWP	49 754 897 6-412 000
Status Pelaporan	Tidak Input - Validasi - Tidak Diverifikasi
Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online pada situs ssharka.menpan.go.id	
	
845006002	

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BAMBANG EKOWARSO
NPWP : 497896076412000 / 3276030904770006
NITKU : 3276030904770006000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 10/02/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 830762063022594105112
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

APP TELAK (TATA KELOLA ELEKTRONIK LAYANAN ANGGARAN KHUSUS)

PERMASALAHAN

- Penyaluran dana direktif Kapolri dan dukops Polri masih dilayani dg tatap muka;
- Penyaluran dana direktif Kapolri dan dukops Polri memerlukan birokrasi & waktu yang lebih panjang;
- Penyaluran dana direktif Kapolri dan dukops Polri secara manual dan memerlukan fisik dokumen.

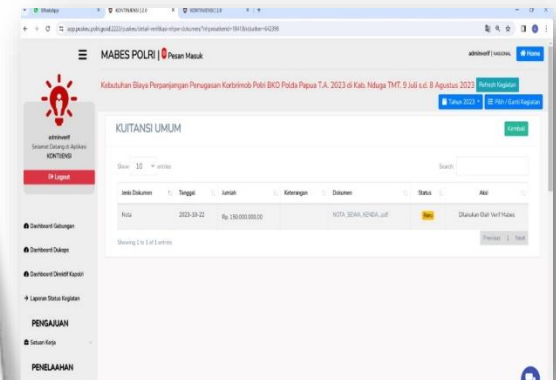
BEFORE

AFTER

- memudahkan pengawasan dalam pendistribusian dana dan pertanggungjawaban
- mempercepat penyaluran dana
- memudahkan pelaksanaan monitoring penyaluran dana dan dapat dimonitor real time oleh PA/KPA;
- Paperless

BENTUK KEGIATAN

- Pembuatan SOP terkait mekanisme penggunaan anggaran dukops Polri dan direktif Kapolri
- Membuat aplikasi untuk memantau penyaluran dana serta mempe rtanggungjawabkan anggaran.



APP PERWABKEU

PERMASALAHAN

- Satker mencetak perwabkeu 3 rangkat (Satker, Bidkeu, Puskeu);
- perlu biaya kirim untuk mengirimkan perwabkeu dari polda ke Mabes Polri;
- perlu waktu yang lama untuk dapat menerima wabkeu yang dikirim oleh polda
- kapasitas gudang yang terbatas
- verifikasi dokumen perwabkeu menjadi tidak fleksibel, efektif dan efisien

BEFORE

AFTER

- cepat, tepat dan akurat
- paperless
- transparan dan akuntabel
- data realtime
- tidak perlu gudang

BENTUK KEGIATAN

- Pembuatan sop terkait pengiriman dan memverifikasi dokumen perwabkeu
- Sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk memonitoring data kontraktual serta mempertanggungjawabkan anggaran kontraktual.

No	Kode	Mengevaluasi	Status	Kategori	Tanggal
1	BK01-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
2	BK02-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
3	BK03-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
4	BK04-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
5	BK05-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
6	BK06-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
7	BK07-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
8	BK08-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
9	BK09-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
10	BK10-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024

No	Kode	Mengevaluasi	Status	Kategori	Tanggal
1	BK01-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
2	BK02-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
3	BK03-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
4	BK04-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
5	BK05-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
6	BK06-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
7	BK07-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
8	BK08-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
9	BK09-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024
10	BK10-PUSKEU	CONTOH NAMA	✓	✓	2024

INOVASI KOMPONEN PENGUNGKIT

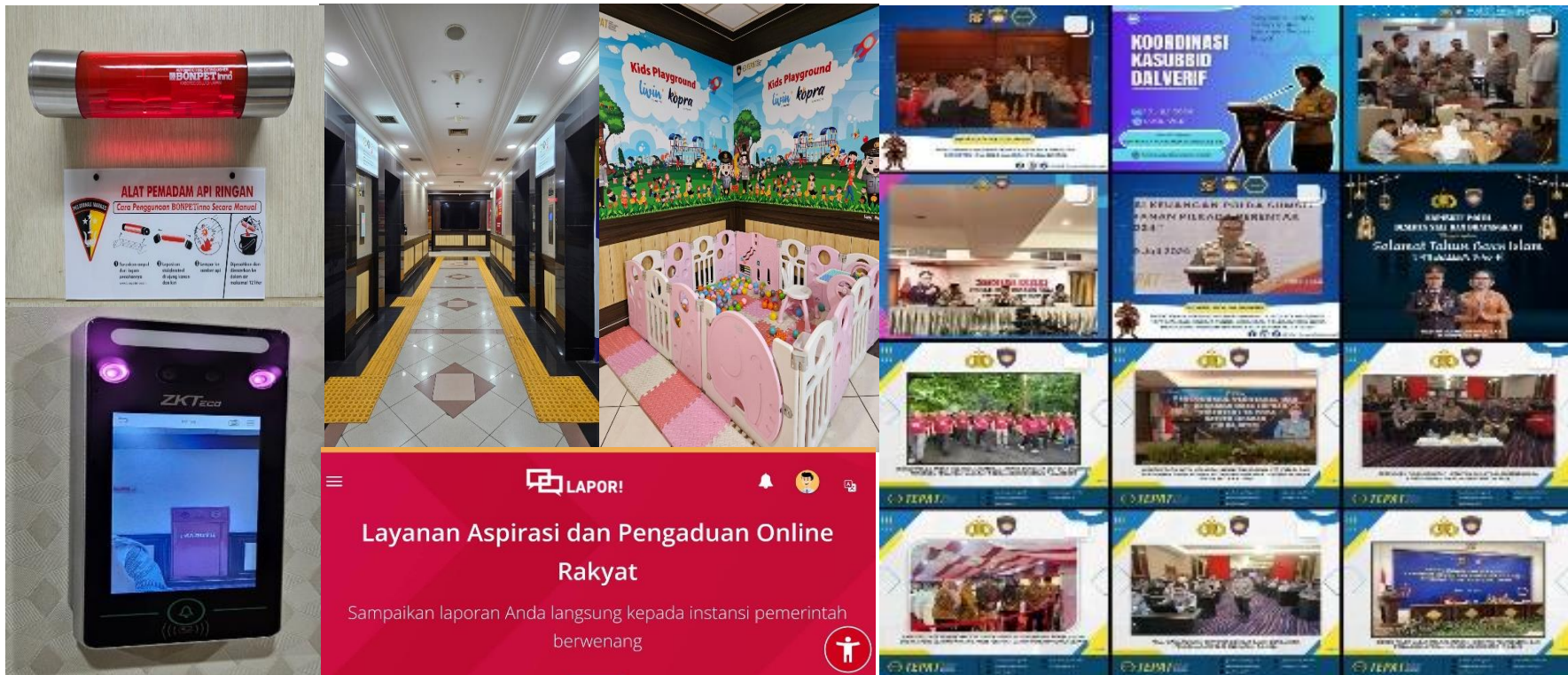
PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS

- 1 MANAJEMEN PERUBAHAN
 - 2 PENATAAN TATA LAKSANA
 - 3 PENATAAN MANAJEMEN SDM
 - 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
 - 5 PENGUATAN PENGAWASAN
-  PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK



UPAYA/INOVASI MENDORONG PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

1. Ruang kerja yang aman dilengkapi *Smart Door Lock*, CCTV dan Alat Pemadam Api Tipe Lempar.
2. Terdapat Fasilitas Ramah Anak dan toilet ramah disabilitas.
3. Lorong yang dilengkapi dengan *Guiding Block*.
4. Informasi terkini melalui Website dan Instagram Puskeu menjadi lebih aktif.
5. Pelayanan Pengaduan lebih mudah dan terpercaya sebelumnya melalui Instagram dan Website, sekarang ditambah melalui Sp4n Lapori!
6. Pelayanan melalui Aplikasi Puskeu Presisi yang terintegrasi, Pelayanan Tanpa Tatap Muka dan Bebas Biaya.



UPAYA/INOVASI PELAYANAN YANG DIPERMUDAH

Pelayanan Penyaluran Tunkin dan Dana Samsat Via Aplikasi Cash Management System serta Dana Direktif/Dukops Kapolri Via Aplikasi Puskeu Presisi

Before

1. Penyaluran Tunkin: Proses pencairan memakan waktu lebih lama karena melibatkan banyak dokumen fisik dan proses verifikasi manual.
2. Penyaluran Dana Samsat: Rentan terhadap kesalahan manusia dan potensi penyelewengan karena prosesnya yang belum terotomatisasi sepenuhnya.
3. Proses penyaluran dana Direktif/Dukops Kapolri seringkali terhambat birokrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

After

1. Penyaluran Tunkin: Dengan CMS, proses pencairan Tunkin menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Semua data tercatat secara digital, minim kesalahan, dan mudah diaudit.
2. Penyaluran Dana Samsat: Aplikasi CMS juga memungkinkan penyaluran dana Samsat secara real-time dan akuntabel, mengurangi risiko kesalahan dan penyelewengan.
3. Penyaluran Dana Direktif/Dukops: Aplikasi Puskeu Presisi mempercepat proses penyaluran dana direktif/Dukops dari Kapolri, memastikan dana sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat sasaran. Aplikasi ini juga meningkatkan transparansi penggunaan dana.

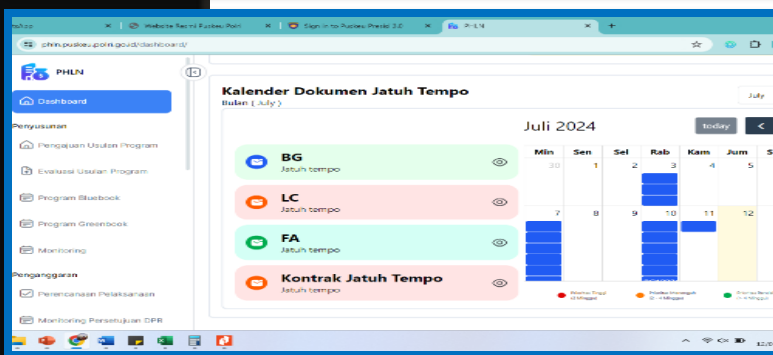
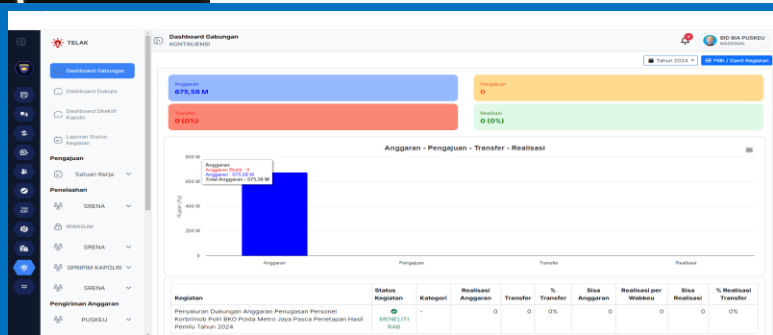
Pelayanan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri via Aplikasi Puskeu Presisi dan adanya Certificate of Payment (CoP)

Before

Tidak dapat memonitor realisasi pembiayaan PLN terhadap ketersediaan pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Puskeu Polri yang mengakibatkan adanya Pagu Kurang/Tidak Cukup.

After

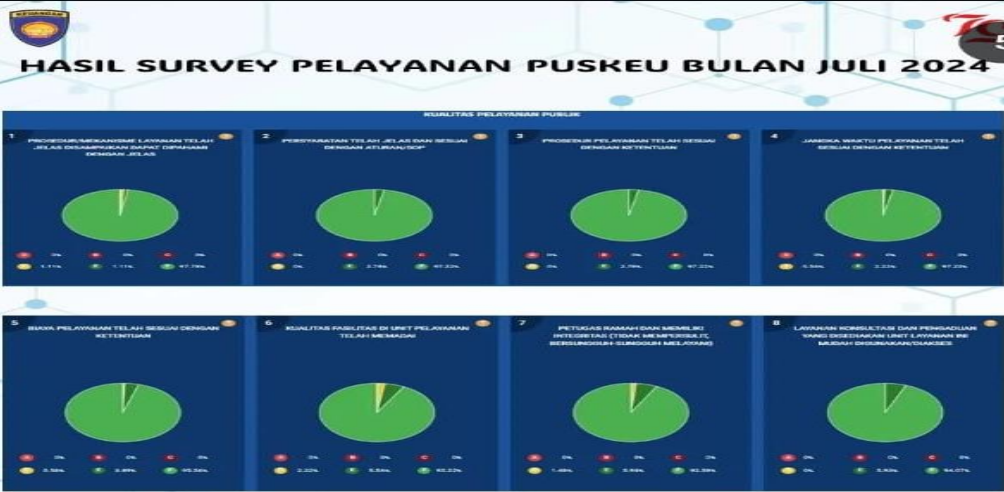
Dapat memonitor Pembiayaan PLN dan mengantisipasi terjadinya Pagu Kurang/Tidak Cukup.



SURVEI PENILAIAN KEPUASAN PELAYANAN

SURVEI PENILAIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN MELALUI APLIKASI MOBILE POLRI SUPER APP DAN WEBSITE ePZI POLRI

puskeupolriofficial

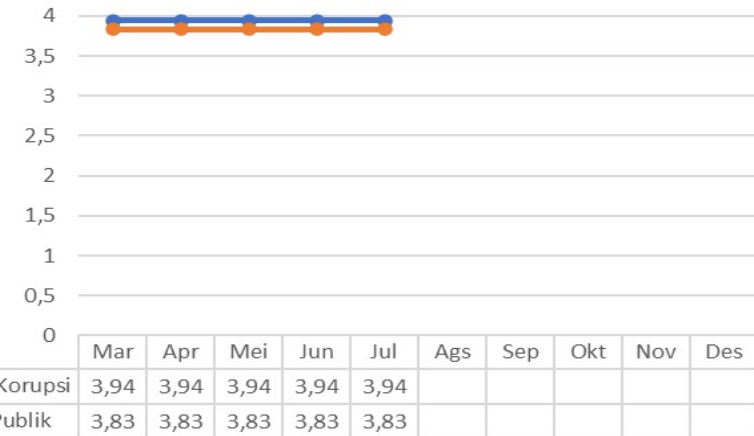


ePZI PUSKEU POLRI



Generated at 25/06/2024 08:50 WIB

Survei Penilaian Kepuasan 2024



puskeu.polri.go.id | puskeupolriofficial | puskeu.polri
 zi.puskeu.polri.info | PUSKEU POLRI

LAYANAN TANPA TATAP MUKA
 # LAYANAN BEBAS BIAYA





PUSAT KEUANGAN POLRI

Puskeu POLRI "TEPAT" Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya

**PUSKEU POLRI
MELAYANI**
PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN
**TANPA TATAP MUKA
DAN
BEBAS BIAYA**

"Satukan Tekad Wujudkan WBBM"

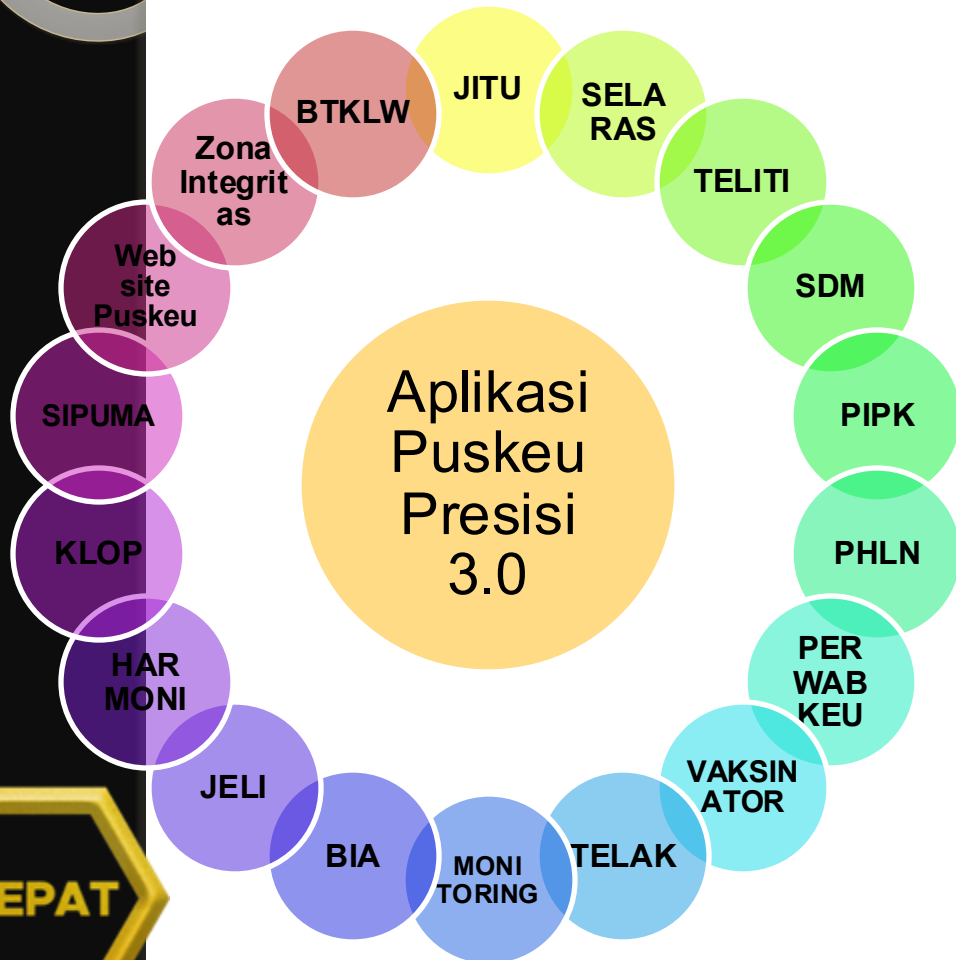
SEKIAN
Terima Kasih

LINK TESTIMONI DI IG

1. <https://www.instagram.com/reel/C6VcykgvfIP/?igsh=MW4zdWxjMnp5aGIIbA==>
2. <https://www.instagram.com/reel/C6YCNGwPC-B/?igsh=MWsxMjNwNmllMmZtYw==>
3. https://www.instagram.com/reel/C6qs3D-P_zM/?igsh=MWxhZzV4cXN0Yndlag==
4. https://www.instagram.com/reel/C65nE6_PIRY/?igsh=anN2NGpkcTZ4dWNz
5. https://www.instagram.com/reel/C6_OX4TPaNA/?igsh=d3d3dHBlemNvb3lz
6. https://www.instagram.com/reel/C7EX_kkvYAR/?igsh=MWV5NXhpcTJraW04Mg==
7. <https://www.instagram.com/reel/C7L68gRPky9/?igsh=MTJnbWtjMGVocWR0aw==>
8. <https://www.instagram.com/reel/C6-IMuAvbOK/?igsh=cTMwNTN3bWlyb2N4>

APP PUSKEU PRESISI

**APLIKASI DALAM PUSKEU PRESISI
(Tahun 2023)**



**APLIKASI PENGEMBANGAN
DALAM PUSKEU PRESISI 3.0
(Tahun 2024)**

- 1. Monitoring Kinerja Berdasarkan Tupoksi Untuk Personel Puskeu Polri.**
- 2. Modul Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).**
- 3. Optimalisasi Tunjangan Kinerja.**
- 4. Super APP PUSKEU mobile**

TEPAT